

KAJIAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN KETAPANG BERBASIS TATA RUANG (Studi Kasus Kawasan Kumuh Nelayan Delta Pawan)

Harsusani⁽¹⁾, Eka Priadi⁽²⁾, Elvira⁽²⁾

*(¹) Mahasiswa Megister Teknik Sipil dan (²) Staf Pengajar Fakultas Teknik
Universitas Tanjungpura
Pontianak*

ABSTRAK

Penataan dan penanganan lingkungan permukiman kumuh kota meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan perumahan perkotaan yang bersih, indah, harmonis dan ramah.

Kajian yang akan diterapkan dalam penataan permukiman yang berlokasi di Kota Ketapang Kecamatan Delta Pawan Khususnya Kelurahan Sampit, adalah Pengembangan Permukiman Perkotaan kawasan kumuh nelayan yang tertata rapi dan indah serta layak huni di lingkungan permukiman kelas masyarakat berpenghasilan rendah seperti nelayan yang mana sesuai dengan kebijakan tata ruang. Dengan merancang pengembangan permukiman yang ideal dan layak huni serta ramah terhadap lingkungan diharapkan dapat mengurangi tingkat hunian kekumuhan, semerautan, pencemaran lingkungan, polusi udara, limbah masyarakat dan pemanasan global yang sekarang ini menjadi masalah di dunia. Untuk konsep tatanan kawasan pada zoning kawasan daerah sarana dan prasarana di tempatkan ditengah - tengah kawasan perumahan. Dalam perancangan sistem sirkulasi kawasan kumuh nelayan, memisahkan antara sirkulasi jalan buat kendaraan roda 2 (dua) baik sepeda dan pejalan kaki akan di bangun diantara rumah penduduk dengan sungai beserta dermaga tambahan kapal nelayan. Dengan memberikan akses pejalan kaki yang khusus di setiap sepanjang tepian sungai, maka para pejalan kaki akan merasakan aman dan nyaman, selain itu juga dapat digunakan sebagai tempat berolahraga. Pada kajian perkembangan pemukiman ini menggunakan konsep waterfront city. Waterfront city dapat berperan mengendalikan suasana sehingga mempengaruhi kenyamanan bagi manusia, seperti pengontrol suhu, angin, serta kelembaban suatu kawasan.

Kata kunci : *Tata Ruang, kumuh, dan aksesibilitas.*

PENDAHULUAN

Kajian Pengembangan lingkungan perumahan perkotaan meliputi pengembangan dan perencanaan sarana hunian, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan perumahan perkotaan yang serasi, sehat, harmonis dan aman. Permukiman perumahan merupakan salah satu sektor strategis dalam upaya membangun manusia indonesia seutuhnya, selain sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia perumahan dan permukiman juga berfungsi strategis di dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi masa depan yang berjati diri.

Kemajuan suatu kota pasti akan di ikuti oleh bertambahnya jumlah penduduk. salah satu permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan suatu kota adalah masalah perumahan dan permukiman. Menurut Bintarto (dalam koestoer, 2001:46) permukiman menempati areal paling luas dalam pemanfaatan ruang, mengalami perkembangan yang selaras dengan perkembangan penduduk dan mempunyai pola-pola tertentu yang menciptakan bentuk dan struktur suatu kota yang berbeda dengan kota lainnya.

Pengembangan pembangunan perumahan untuk hunian merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduk di suatu wilayah. Bahkan dalam konsideran UU No. 1/2011 tetang perumahan

dan Kawasan Permukiman secara tegas disebutkan, Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Persoalan perkotaan antara lain adanya perbedaan antara permintaan dan penyediaan perumahan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat (2008), diketahui bahwa tata cara pembangunan perumahan dapat dikategorikan atas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah swasta di satu sisi (formal) dan pembangunan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat (swadaya) di sisi lainnya.

Pertumbuhan penduduk perkotaan merupakan permasalahan utama bagi peningkatan permintaan akan rumah. Konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan penduduk tersebut adalah meningkatnya kebutuhan pelayanan akan prasarana dan sarana kota termasuk kebutuhan perumahan yang layak bagi penduduk.

Pada umumnya perkembangan permukiman yang pesat di kota merupakan konsekuensi perkembangan pada sektor perkebunan, pertambangan, industri, jasa dan perdagangan, serta banyaknya penduduk yang semakin banyak menetap di Kota khususnya Kota Ketapang. Pertumbuhan penduduk Kota Ketapang yang pesat lebih disebabkan oleh pertumbuhan sosial (social increase). Sebagian besar masyarakat lokal di Kota Ketapang saat ini hidupnya termarginalisasi dan umumnya mereka tinggal di sekitar kompleks-kompleks permukiman yang terdapat di Kota Ketapang dan di sepanjang pinggir sungai Pawan.

Sebagai salah satu Kabupaten paling selatan di Kalimantan Barat, Kota Ketapang tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peranannya dalam konstelasi wilayah yang sangat lebih luas dibandingkan Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Khusus yang kita bahas adalah Wilayah Kec. Delta Pawan, Kec. Muara Pawan dan Kec. Benua Kayong yang akan kita jadikan dan dibahas Kota Ketapang disamping sebagai wilayah permukiman, juga

sebagai kota Usaha perdagangan, jasa dan industri.

Secara garis besar, alokasi pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ketapang Tahun 2010-2030, sebagian besar diperuntukan untuk kawasan permukiman, dimana pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 24,41% (5.866,27 ha) dari luas total lahan yang dimiliki Kota Ketapang saat ini. Setelah itu diikuti oleh kawasan konservasi (pelestarian alam) sekitar 12,49% (1.347,16 ha), kawasan sentra agribisnis sebesar 7,24% (800 ha), dan kawasan jasa perdagangan seluas 4,55% (491,00 ha).

Kota Ketapang sebagai Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat sebelah selatan yang juga sebagai barometer Propinsi Kalimantan Barat berdekatan dengan pulau jawa tumbuh sebagai pusat perekonomian, pendidikan dan sektor jasa sehingga menjadi magnet bagi masyarakat dari daerah-daerah wilayah Kalbar untuk datang mengadu nasib maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi maupun pertumbuhan alamiah tidak tersebar dengan merata sehingga terjadi konsentrasi penduduk pada kawasan-kawasan tertentu, yang menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi pada suatu kawasan, sedangkan kawasan yang lain masih relative kosong. Ketersediaan sarana dan prasarana sosial yang lengkap karena fungsinya sebagai Kota juga menjadi alasan penduduk untuk bertempat tinggal.

Jumlah penduduk Kota Ketapang di tahun 1980 sebanyak 304.490 jiwa pada tahun 1990 meningkat menjadi 398.658 jiwa, kemudian menjadi 450.297 di tahun 2010. Dengan demikian selama kurun waktu 30 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2010 penduduk Kota Ketapang bertambah hampir dua kali lipat atau sebanyak 245.807 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 58,702 km², maka pada tahun 2010 setiap km² ditempati rata-rata penduduk sebanyak 52 jiwa/km².

Berdasarkan kenyataan-kenyataan bahwa pembangunan perumahan sangat dipengaruhi oleh aspek. Selain tingginya laju pertumbuhan penduduk terdapat aspek lain yang tidak kalah penting yaitu, dukungan (berupa arah kebijakan spatial, program dan regulasi) dan aspek ekonomi sosial masyarakat (meliputi

lapangan kerja dan pendapatan) akan berimplikasi terhadap ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan yang sangat besar.

METODE PENELITIAN

Studi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Delta Pawan Kelurahan Sampit kawasan tepi sungai Pawan (Kawasan Nelayan), yang berada di Kabupaten Ketapang. Waktu Penelitian di mulai bulan Januari sampai dengan April 2017.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan berlandaskan pada paradigma rasionalistik. Kajian dan pengamatan berdasar kajian dan pengamatan empiris terhadap perubahan yang terjadi dilihat secara time series pada periode tertentu sesuai dengan ketersediaan data yang ada dan data hasil temuan di lapangan yang terseleksi kemudian dilakukan kajian.

Data dikumpulkan untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi atau mengklarifikasi teori/konsep dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan menggunakan data secara kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang tingkat pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perumahan dalam kurun waktu tertentu. Kurun waktu sebagai tolak ukur yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian tesis ini adalah tahun 2010-2020 dengan tujuan untuk melihat terjadinya pertumbuhan pembangunan perumahan di Kota Ketapang.

Tujuan analisa data adalah menyederhanakan data-data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang dikumpulkan diseleksi dan diolah yang kemudian dilakukan analisa. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif sebagai dasar untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi. Data yang dikumpulkan, baik primer maupun sekunder diolah dengan menggunakan analisis data dan data overlay.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kecamatan Delta Pawan

1. Kabupaten Ketapang yang luasnya 31.588,1 km² merupakan kabupaten terluas di provinsi Kalimantan Barat.
2. Letak geografis wilayah Kabupaten Ketapang sangat strategis bila dilihat dari wilayah-wilayah yang berbatasan dengannya. Wilayah ini berbatasan dengan enam kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dari aspek pertumbuhan penduduk terlihat adanya indikasi bahwa pusat-pusat permukiman selain Kota Ketapang yang jumlah penduduknya cenderung relatif cepat pertumbuhannya adalah Sandai, Balai Berkuak, Manis Mata, Aur Kuning, Marau, dan Air Upas.
4. Pengembangan bandara Rahadi Osman dihadapkan dengan kendala semakin padatnya kawasan permukiman di sekitar kawasan bandara. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam masa rencana, dilaksanakan kegiatan pengembangan atau pemindahan kawasan bandara ke kecamatan Muara Pawan, Delta pawan, Benua Kayong dan Kendawangan.
5. Wilayah Kabupaten Ketapang pada dasarnya sudah memiliki struktur tata ruang wilayah yang dapat mendukung terciptanya sinergi wilayah yang cukup besar.
6. Sistem hierarki pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Ketapang belum dapat menciptakan tingkat keefektifan pelayanan secara optimal.
7. Pusat permukiman yang perlu diprioritaskan pengembangannya untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pelayanan ke seluruh wilayah Kabupaten Ketapang adalah Kota Sandai dan Tumbang Titi yang diiringi dengan pengembangan jaringan jalan provinsi ruas Balai Berkuak – Nanga Mahap dan Simpang Dua Teluk – Melano, serta jalan nasional ruas Nanga Tayap – Batu Tajam (Tumbang Titi) – Pelang.

Permukiman Kumuh

Pengertian pemukiman kumuh secara umum menurut Rabekka dalam Sobirin (2001) bahwa yang paling menonjol terlihat dari kualitas bangunan rumahnya yang tidak permanen, dengan kerapatan bangunan yang tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan yang sangat terbatas, walaupun ada berupa gang-gang sempit yang berliku-liku, tidak adanya saluran drainase dan tempat penampungan sampah sehingga terlihat kotor dan jorok. Tidak jarang pula terdapat daerah yang secara berkala mengalami banjir.

Fenomena yang sering muncul di kota-kota besar adalah tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kemampuan kota dalam menyediakan fasilitas umum. Dampaknya adalah munculnya lingkungan kumuh, kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan tapak kawasan, inefisiensi penggunaan lahan serta rendahnya tingkat pelayanan kebutuhan air bersih, dan lainnya baik dari segi keterjangkauan maupun kualitas pelayanan (Saraswati, 2001).

Yudohusodo (1998) mendefinisikan kampung kumuh sebagai bentuk hunian tidak berstruktur, tidak berpola dengan letak rumah dan jalan-jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana pemukiman tidak mendukung, terlihat tidak ada got, sarana air bersih, MCK, dan lainnya, bentuk fisiknya tidak layak misalnya setiap tahun banjir, dan lain-lain.

Menurut Silas (2013) pemukiman kumuh dapat diartikan menjadi dua bagian, yang pertama ialah kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan pemukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio pemukiman kumuh. Pengertian pemukiman kumuh yang kedua ialah kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak perkembangan kota yang semula baik, lambat laun menjadi kumuh yang disebabkan oleh adanya mobilitas sosial ekonomi yang stagnan. Adapun karakteristik pemukiman kumuh, yaitu:

Keadaan rumah pada pemukiman kumuh terpaksa dibawah standar rata-rata 6 m²/orang. Sedangkan fasilitas perkotaan secara langsung

tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan pemukiman yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya. Pemukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah (opportunity value) dan harga rumah juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa. Manfaat pemukiman disamping pertimbangan lapangan kerja dan harga murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi. Hampir setiap orang tanpa syarat yang bertele-tele pada setiap saat dan tingkat kemampuan membayar apapun, selalu dapat diterima dan berdiam di sana.

Menurut Johan (2011) pemukiman kumuh memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel, baik karena pertumbuhan penduduk akibat kelahiran maupun karena adanya urbanisasi.
2. Dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, atau memproduksi subsisten yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Rumah-rumah yang ada di daerah ini merupakan rumah darurat yang terbuat dari bahan-bahan bekas dan tidak layak.
4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, biasanya ditandai oleh lingkungan fisik yang jorok dan mudahnya tersebar penyakit menular.
5. Pertumbuhannya yang tidak terencana sehingga penampilan fisiknya pun tidak teratur dan tidak terurus; jalan yang sempit, halaman tidak ada, dsb.
6. Kuatnya gaya hidup "pedesaan" yang masih tradisional.
7. Secara sosial terisolasi dari pemukiman lapisan masyarakat lainnya
8. Ditempati secara ilegal atau status hukum tanah yang tidak jelas (bermasalah).
9. Biasanya ditandai oleh banyaknya perilaku menyimpang dan tindak kriminal

Menurut Anonim (2009) kawasan pemukiman kumuh dapat dibedakan dalam beberapa tipologi, yaitu:

1. Permukiman kumuh nelayan

Merupakan pemukiman kumuh yang terletak di luar arena antara garis pasang

tertinggi dan terendah, dengan bangunan-bangunan yang langsung bertumpu pada tanah, baik itu bangunan rumah tinggal atau bangunan lainnya. Rata-rata lokasinya ditepi pantai.

Pemukiman kumuh dekat pusat kegiatan sosial ekonomi. Merupakan pemukiman kumuh yang terletak di sekitar pusat-pusat aktifitas sosial-ekonomi. Seperti halnya lingkungan industri, sekitar pasar tradisional, pertokoan, lingkungan pendidikan/kampus, sekitar obyek-obyek wisata dan pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi lainnya.

2. Permukiman Kumuh Pinggir Kota

Merupakan pemukiman kumuh yang berada di luar pusat kota (urban fringe), yang ada pada umumnya merupakan pemukiman yang tumbuh dan berkembang di pinggiran kota sebagai konsekuensi dari perkembangan kota, perkembangan penduduk yang sangat cepat serta tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota yang sangat tinggi.

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasiskan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata di daerah bagian selatan provinsi.

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasiskan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata di daerah bagian selatan provinsi.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

1. Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang berbasis pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri, dan pariwisata;
2. Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agropolitan, minapolitan, dan agroindustri;

3. Penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri, dan pariwisata;
4. Pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran produksi perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan industri;
5. Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi;
6. Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri, dan pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Pengembangan wilayah-wilayah dengan potensi pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri, dan pariwisata; dan
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang.

Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agropolitan, minapolitan, dan agroindustri sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Menetapkan wilayah agropolitan, minapolitan, dan agroindustri kabupaten;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan agropolitan, minapolitan dan agroindustri; dan
3. Meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan agropolitan, minapolitan, dan agroindustri.

Strategi penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri, dan pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;

2. Memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;
3. Memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan pedesaan sebagai hinterlandnya;
4. Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
5. Mengembalikan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
8. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
7. Menetapkan pola pengembangan sistem pusat pertumbuhan wilayah sebagai dasar untuk mendistribusikan berbagai sarana dan prasarana pengembangan wilayah secara proporsional dan merata;
9. Meningkatkan aksesibilitas antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan pedesaan, serta kawasan strategis yang memerlukan aksesibilitas untuk percepatan perkembangannya terutama kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis (baik KSN, KSP, ataupun KSK) dari sudut kepentingan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten;
10. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani atau relatif jauh dari pusat pertumbuhan yang telah ada dalam rangka mempercepat upaya pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal; dan
11. Mendorong perkembangan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan lainnya untuk peningkatan keefektifan dan efisiensi pelayanan terhadap wilayah di sekitarnya yang lebih lanjut dapat mendorong perkembangan wilayah pedesaan.

Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam meliputi:

1. Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalam mewujudkan keterpaduan layanan transportasi darat dan laut;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
3. Mengembangkan akses jaringan transportasi menuju kawasan pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata serta kawasan terisolir;
4. Mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkar perkotaan dan jalan lingkar utara-selatan wilayah kabupaten;
5. Mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir; dan
6. Meningkatkan jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.

Penyebaran Ruang Kumuh Kecamatan Delta Pawan.

Berdasarkan jumlah rumah dalam hal segi kepemilikannya, ruang kumuh terbagi menjadi tiga, yaitu ruang kumuh, ruang kumuh nelayan dan ruang kumuh pinggiran kota. Dalam hal penelitian ini kami ambil ruang kumuh nelayan kecamatan Delta Pawan Kelurahan Sampit, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Ruang Lingkup Administrasi Kumuh

Kelurahan/Desa	Lingkup Administrasi		Luas		Jumlah Penduduk	
	Kecamatan	RT/RW	(Ha)	(%)	(Jiwa)	(%)
Sampit	Delta Pawan	Menyebar	37,93	38,73	13.780	30,77
Kalinilau	Delta Pawan	Menyebar	9,8	10,01	11.309	25,39
Sukatangun	Delta Pawan	Menyebar	11,7	11,95	7.153	15,97
Sei Awan Kiri	Muara Pawan	Menyebar	10,4	10,62	3.728	8,32
Suka Maju	Muara Pawan	Menyebar	5,6	5,72	1.802	4,02
Sei Awan Kanan	Muara Pawan	Menyebar	8,7	8,88	3.650	8,15
Tanjung Pasar	Muara Pawan	Menyebar	4,5	4,59	1.200	2,68
Mayak	Muara Pawan	Menyebar	3,7	3,78	1.150	2,57
Tanjung Pira	Muara Pawan	Menyebar	5,6	5,72	950	2,12

(Kab. Ketapang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, 2016)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil seluruh proses penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk penataan, pemugaran dan perencanaan kawasan perumahan permukiman kumuh harus dilengkapi dengan data-data lapangan yang akurat, sehingga dalam perencanaan dan perancangan permukiman kumuh didapatkan hasil yang maksimal.
 2. Dalam proses perencanaan dan perancangan kawasan permukiman harus disesuaikan dengan standar- standar yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan yang berlaku (Misalnyag: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan).
 3. Secepatnya pemerintah daerah setempat untuk mendukung pelaksanaan penataan kawasan kumuh tersebut.
 4. Dukungan masyarakat setempat terhadap proses penanganan kekumuhan sangat tinggi serta perlu adanya dukungan pemerintah daerah/pusat.
 5. Agar penanganan permukiman kumuh nelayan berada pada Instansi teknis terkait yaitu dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan lingkungan hidup.
3. Secepatnya pemerintah daerah setempat untuk mendukung pelaksanaan penataan kawasan kumuh tersebut.
 4. Dukungan masyarakat setempat terhadap proses penanganan kekumuhan sangat tinggi serta perlu adanya dukungan pemerintah daerah/pusat.
 5. Agar penanganan permukiman kumuh nelayan berada pada Instansi teknis terkait yaitu dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan lingkungan hidup.

Saran

Berdasarkan hasil seluruh proses penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk penataan, pemugaran dan perencanaan kawasan perumahan permukiman kumuh harus dilengkapi dengan data-data lapangan yang akurat, sehingga dalam perencanaan dan perancangan permukiman kumuh didapatkan hasil yang maksimal.
2. Dalam proses perencanaan dan perancangan kawasan permukiman harus disesuaikan dengan standar- standar yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan yang berlaku (Misalnyag: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Budihardjo, Eko. 2009. Perumahan dan Permukiman di Indonesia.. Bandung: Alumni.
- Budihardjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo. 2009. Wawasan Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan. Bandung: Alumni
- Budihardjo, Eko. 2009. Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan. Bandung: Alumni.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang. Ketapang Dalam Angka 2012.
- Halim, Dk. 2008. Psikologi Lingkungan Perkotaan. Bumi Angkasa. Jakarta.
- Kabupaten Ketapang Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang, 2012.
- Kecamatan Delta Pawan Dalam Angka. 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang, 2012.
- Nazir, Moh. 1983. Metode penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Panduan Penyusunan SPPIP dan RPKPP Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum.